

# JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

## Tantangan Pendidikan Pancasila Di Era Digitalisasi

Vegalira Novantika<sup>1</sup>, Suci Asriani<sup>2</sup>, Suwarsih Handayani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mataram, NTB, Indonesia, [vegalira0@gmail.com](mailto:vegalira0@gmail.com).

<sup>2</sup>Universitas Mataram, NTB, Indonesia, [suciasriani03@gmail.com](mailto:suciasriani03@gmail.com).

<sup>3</sup>Universitas Mataram, NTB, Indonesia, [suwarsihhandayani07@gmail.com](mailto:suwarsihhandayani07@gmail.com).

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji secara mendalam terkait dengan bagaimana digitalisasi berdampak pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan karakter generasi muda. Selain itu, artikel ini juga membahas bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa digitalisasi tidak hanya membawa kemudahan dalam akses informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan yang signifikan bagi pendidikan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi dalam pendidikan Pancasila di era digitalisasi yang semakin berkembang. Penulis berusaha meningkatkan pemahaman dengan membaca berbagai jurnal yang telah dipublikasikan oleh berbagai ahli. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur yang komprehensif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan Pancasila di era digitalisasi meliputi meluasnya disinformasi, dangkalnya pemahaman terhadap Pancasila, terganggunya partisipasi masyarakat, keragaman yang perlu dikelola dengan baik, arus globalisasi yang semakin kuat, masuknya budaya asing ke Indonesia, penggunaan teknologi yang bebas tanpa batas, penyebaran berita bohong, serta kurangnya kesadaran dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan ini, kita dapat mendorong diskusi yang konstruktif dan inovasi strategi pendidikan Pancasila yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga generasi muda dapat lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka.

**Kata Kunci:** Digitalisasi, Pendidikan Pancasila, tantangan, studi literatur, teknologi.

\*Correspondence Address: [vegalira0@gmail.com](mailto:vegalira0@gmail.com)

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	-	30 March 2026

### PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pendidikan adalah proses yang membantu manusia menjadi lebih baik. Awalnya, seseorang mungkin tidak tahu atau tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi melalui pendidikan, mereka bisa belajar dan berkembang. Pendidikan juga membantu seseorang untuk berpikir lebih dewasa tentang masa depan yang akan mereka hadapi (Kurniawansyah, 2023).

Di era globalisasi yang dibawa oleh kemajuan teknologi digital, Indonesia tidak dapat mengendalikan dampak signifikan yang ada terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat umum. Teknologi digital telah mengubah cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, dan bahkan berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penggunaan teknologi digital yang sangat agresif dapat mempengaruhi Pancasila sebagai kompas moral dan filosofi Indonesia. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk memahami bahwa teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada domain sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu,

penggunaan teknologi digital harus dilandasi oleh prinsip-prinsip yang sejalan dengan Pancasila dan menjunjung tinggi kearifan dan jati diri bangsa. Di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital yang cepat, perubahan teknologi menjadi salah satu hal yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga berdampak pada struktur sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana teknologi digital berkembang dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa dan menjaga keharmonisan sosial. Lima sila Pancasila, yang meliputi nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam berinteraksi, berperilaku, dan menjalani kehidupan bermasyarakat. Namun, di tengah pesatnya perkembangan zaman, terutama dengan hadirnya era digitalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.

Era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Akses informasi yang cepat dan mudah melalui media sosial dan platform digital lainnya memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber, baik yang valid maupun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, kebebasan berkomunikasi dan berekspresi di dunia maya memberikan peluang untuk berbagi ide, opini, dan pengetahuan. Namun, di sisi lain, kebebasan ini juga memunculkan tantangan besar dalam menjaga keberagaman nilai, identitas nasional, dan moralitas yang tercermin dalam Pancasila.

Dengan segala tantangan yang dihadapi, pendidikan Pancasila di era digitalisasi harus dapat beradaptasi dan memberikan solusi yang relevan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang tidak hanya mengajarkan konsep dasar Pancasila, tetapi juga mendorong siswa untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam perilaku digital mereka. Mengajarkan etika digital, kecerdasan sosial, dan keterampilan kritis dalam menghadapi informasi di dunia maya menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa Pancasila tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kehidupan yang semakin digital.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, yang menyoroti dinamika perubahan sosial dan budaya akibat pesatnya digitalisasi, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian mendalam guna mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif berbagai tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Pancasila dalam konteks era digital ini.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan bagaimana proses digitalisasi telah mempengaruhi cara penyampaian pendidikan Pancasila, serta untuk mengeksplorasi dampak yang ditimbulkan terhadap karakter dan kesadaran berbangsa di kalangan generasi muda saat ini. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang bermanfaat dan relevan bagi para pendidik, pembuat kebijakan serta masyarakat umum dalam upaya untuk memperkuat pendidikan Pancasila ditengah dinamika perubahan zaman yang terus berlangsung.

## **METODE | METHOD**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur. Menurut Creswell, John. W. (2014;40) studi literatur merupakan suatu rangkuman tertulis yang mencakup artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang mendefinisikan teori dan menyediakan informasi mengenai masa lalu dan masa kini untuk diorganisasikan berdasarkan topik dan dokumen yang diperlukan. Selain itu, menurut M. Nazir. (2014)

dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian*, studi literatur atau studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dan penelaahan terhadap buku-buku, literatur- literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diinvestigasikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, studi literatur dipilih sebagai metode penelitian karena memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai teori dan konsep yang terkait dengan tantangan pendidikan Pancasila di era digitalisasi. Melalui kajian terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan, peneliti dapat menganalisis bagaimana perkembangan teknologi digital memengaruhi efektivitas pendidikan Pancasila, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION**

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah sistem pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk kesadaran dan karakter warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan ini juga bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam praktiknya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mencakup berbagai aspek, seperti sejarah bangsa, konstitusi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Selain itu, pendidikan ini bertujuan untuk membentuk sikap positif dalam membangun persatuan, kesatuan, dan toleransi antar golongan serta agama.

Di era digital saat ini, teknologi digital memberikan dampak besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Teknologi ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dan filosofi bangsa Indonesia dalam menghadapi pengaruh teknologi digital. Digitalisasi tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga mempengaruhi berbagai bidang seperti ekonomi, sosial politik, dan budaya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan menghormati identitas serta kearifan bangsa.

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah mengintegrasikan teknologi digital dalam pendidikan kewarganegaraan secara berkelanjutan. Ini bisa dilakukan dengan memperkenalkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban melalui berbagai platform digital, seperti e-learning, aplikasi mobile, dan media sosial, agar materi pendidikan kewarganegaraan lebih interaktif dan menarik. Selain itu, teknologi digital juga bisa digunakan untuk simulasi dan permainan edukasi yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya mereka masing-masing. Dengan cara ini, diharapkan pemahaman siswa tentang materi kewarganegaraan menjadi lebih mendalam dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi teknologi digital dalam pendidikan kewarganegaraan juga mendukung pembelajaran seumur hidup, di mana individu dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan mereka di berbagai tahap kehidupan.

Dalam dunia digital, manusia tidak hanya bergantung pada internet, tetapi juga harus menjadi warga negara yang cerdas dan mampu berinteraksi dengan orang lain. Di Indonesia, kondisi ini diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan, yang merupakan mata pelajaran wajib di perguruan tinggi. Proses ini bertujuan untuk menumbuhkan kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan, sesuai dengan UU No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang termasuk dalam mata kuliah wajib umum (MKWU), yang ditawarkan untuk membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, mata kuliah ini bertujuan untuk menciptakan warga negara yang cerdas secara emosional, spiritual, intelektual, dan sosial, serta mampu menyelesaikan masalah dengan bijak.

Pendidikan Pancasila saat ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Tantangan-tantangan tersebut perlu diidentifikasi dan diatasi agar tujuan pendidikan dalam membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan memiliki rasa cinta tanah air dapat tercapai. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya:

1. Meluasnya Disinformasi

Salah satu tantangan paling nyata dalam pendidikan Pancasila di era digitalisasi adalah meluasnya disinformasi yang menyebar dengan sangat cepat dan masif melalui berbagai platform digital. Internet dan media sosial telah membuka akses informasi secara luas bagi masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk pelajar dan mahasiswa. Di satu sisi, hal ini merupakan peluang besar karena mempercepat proses belajar dan memperluas cakrawala pengetahuan. Namun di sisi lain, era keterbukaan informasi ini juga membawa dampak negatif, yaitu membanjirnya informasi yang tidak terverifikasi, menyesatkan, atau bahkan sengaja disebarkan untuk tujuan ideologis tertentu. Disinformasi yang beredar sering kali menyangkut isu-isu sensitif seperti agama, kebangsaan, dan ideologi negara, termasuk Pancasila. Ketika informasi yang salah tentang Pancasila beredar luas dan diterima begitu saja tanpa pemahaman kritis, hal ini dapat menggerus makna asli dari nilai-nilai luhur Pancasila, seperti toleransi, keadilan sosial, dan persatuan dalam keberagaman.

Pengaruh disinformasi terhadap pendidikan Pancasila sangat merusak karena dapat menimbulkan distorsi pemahaman dalam benak generasi muda. Narasi-narasi alternatif yang menyimpang dapat membentuk persepsi keliru bahwa Pancasila sudah usang, tidak relevan, atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan dan modernitas. Lebih dari itu, disinformasi juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan paham radikal atau ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan identitas kebangsaan Indonesia. Akibatnya, nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya ditanamkan melalui pendidikan menjadi terpinggirkan, digantikan oleh pandangan sempit dan eksklusif yang mengancam persatuan bangsa.

Menghadapi tantangan ini, pendidikan Pancasila harus bertransformasi menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola pikir generasi digital. Literasi digital menjadi kunci utama yang harus ditanamkan sejak dini dalam kurikulum, agar peserta didik tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga dapat memilah, mengevaluasi, dan mengkritisi sumber-sumber informasi yang mereka terima. Selain itu, pendidikan Pancasila juga perlu menekankan pentingnya berpikir kritis, dialog terbuka, serta pemahaman mendalam tentang sejarah dan konteks nilai-nilai Pancasila. Guru, dosen, dan para pendidik dituntut untuk menjadi agen literasi yang aktif, bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu siswa memahami kebenaran di tengah gempuran informasi yang simpang siur. Oleh karena itu, penguatan pendidikan Pancasila di era digital bukan hanya soal isi kurikulum, tetapi juga menyangkut cara penyampaian, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas ideologi bangsa melalui pengetahuan yang benar dan bertanggung jawab.

2. Dangkalnya Pemahaman terhadap Pancasila

Meskipun Pancasila telah menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan nasional sejak lama, kenyataannya masih banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang memiliki pemahaman dangkal atau sekadar hafalan terhadap nilai-nilai dasar

ideologi bangsa ini. Pemahaman yang bersifat permukaan ini sering kali hanya sebatas mengenal lima sila dalam Pancasila secara verbal, tanpa mampu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari atau memahami maknanya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan ini semakin nyata di era digital, di mana arus informasi begitu cepat dan perhatian masyarakat—khususnya generasi digital—mudah teralihkan oleh konten-konten hiburan atau viral yang lebih menarik secara visual dan emosional dibandingkan materi-materi pembelajaran konvensional tentang nilai-nilai kebangsaan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan inovasi dalam metode pengajaran pendidikan Pancasila. Metode pembelajaran tradisional yang terlalu teoritis dan berorientasi pada hafalan tidak lagi efektif di tengah lanskap digital yang dinamis. Guru dan lembaga pendidikan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih interaktif, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Misalnya, menggunakan studi kasus aktual, diskusi kritis, permainan edukatif berbasis digital (gamification), atau pemanfaatan media sosial sebagai sarana refleksi nilai Pancasila dalam situasi kekinian. Selain itu, penting juga untuk membawa pendidikan Pancasila ke luar ruang kelas dengan melibatkan komunitas, organisasi kepemudaan, dan media massa dalam kampanye nilai-nilai kebangsaan, sehingga cakupan dan dampaknya menjadi lebih luas dan menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang.

Tidak kalah penting, pendidikan Pancasila juga harus disesuaikan dengan cara berpikir generasi muda yang kini lebih kritis, terbuka, dan terbiasa mempertanyakan segala sesuatu. Oleh karena itu, pendekatan dogmatis harus dihindari. Pendidikan Pancasila harus membuka ruang dialog yang sehat, di mana peserta didik bisa berdiskusi, menyampaikan pandangan, dan mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu kontemporer, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta keberagaman identitas budaya dan agama. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai simbol formal negara, tetapi sebagai pedoman hidup yang relevan, dinamis, dan mampu memberikan jawaban atas tantangan zaman. Tanpa inovasi dan pendekatan yang kontekstual, pendidikan Pancasila berisiko menjadi sekadar formalitas yang kehilangan makna di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang terus melaju.

### 3. Terganggunya Partisipasi Aktif Masyarakat

Salah satu tantangan krusial dalam pendidikan Pancasila di era digital adalah terganggunya partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun teknologi digital memberikan banyak kemudahan dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan mengekspresikan pendapat, ironisnya hal ini justru sering berujung pada berkurangnya keterlibatan nyata dalam aktivitas kewarganegaraan. Platform digital dipenuhi oleh berbagai bentuk hiburan seperti video singkat, gim daring, konten viral, dan media sosial yang secara tidak langsung menyita perhatian dan waktu masyarakat. Akibatnya, ruang untuk berdiskusi, merenung, dan berkontribusi secara nyata terhadap isu-isu kebangsaan menjadi semakin sempit. Ini menjadi tantangan serius bagi pendidikan Pancasila yang bertujuan tidak hanya menanamkan nilai-nilai, tetapi juga membentuk warga negara yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.

Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara pemahaman konseptual tentang Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan nyata. Banyak peserta didik mengetahui nilai-nilai Pancasila secara teoritis, namun tidak menunjukkan partisipasi yang nyata dalam kehidupan sosial-politik, seperti mengikuti kegiatan organisasi, menyuarakan pendapat secara konstruktif, atau turut serta dalam proses demokrasi. Era digital membuat keterlibatan fisik dan sosial terasa semakin jauh karena banyak

interaksi yang beralih ke dunia maya yang bersifat individualistis. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila dituntut untuk tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga mendorong partisipasi aktif melalui pendekatan yang kreatif dan relevan dengan kebiasaan generasi digital.

Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan strategi yang inovatif dalam pembelajaran dan penguatan nilai kewarganegaraan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan platform digital itu sendiri sebagai sarana pembentukan partisipasi yang bermakna. Misalnya, dengan mengembangkan program pembelajaran berbasis proyek yang mengajak siswa untuk mengidentifikasi masalah sosial di lingkungannya, berdiskusi melalui forum daring, hingga mempublikasikan hasil gagasan mereka secara digital. Selain itu, pendidikan Pancasila perlu menghadirkan figur-figur inspiratif dan konten positif di media sosial yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dihidupi dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, generasi muda tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen nilai yang berkontribusi aktif terhadap pembangunan karakter bangsa di era digital.

#### 4. Keragaman yang Perlu Dikelola

Salah satu kekuatan sekaligus tantangan terbesar bagi Indonesia adalah keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang begitu luas. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila memegang peranan penting sebagai sarana untuk membangun kesadaran kebangsaan yang inklusif dan menghargai perbedaan. Namun di era digital, pengelolaan keragaman ini menjadi semakin kompleks. Dunia maya membuka ruang bebas bagi setiap individu untuk mengekspresikan pandangan dan identitasnya, namun sayangnya, tidak jarang perbedaan tersebut justru menjadi sumber gesekan, polarisasi, bahkan konflik—terutama ketika identitas kelompok diperkuat secara eksklusif dan dipertentangkan dengan yang lain. Jika tidak dikelola dengan bijak, ruang digital dapat memperbesar sekat-sekat sosial dan memperlemah semangat persatuan yang menjadi inti dari Pancasila.

Pendidikan Pancasila di era digital harus mampu merespons kondisi ini dengan pendekatan yang tidak hanya mengedepankan nilai-nilai persatuan secara normatif, tetapi juga mampu memahami dan mengelola perbedaan secara realistis dan kontekstual. Materi pembelajaran tidak cukup hanya menekankan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, tetapi juga harus mengajak peserta didik memahami keragaman melalui pengalaman nyata dan pembelajaran lintas budaya. Hal ini bisa dilakukan melalui dialog antarbudaya, kolaborasi antarsekolah dari latar belakang yang berbeda, hingga pemanfaatan media digital untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal yang beragam. Pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan narasi persatuan dan toleransi menjadi sangat penting dalam melawan narasi eksklusivisme dan intoleransi yang juga banyak beredar secara daring.

Penting pula bagi pendidikan Pancasila untuk mengembangkan sikap empati, toleransi, dan keterbukaan pikiran di kalangan peserta didik. Ini bisa dicapai melalui metode pembelajaran yang bersifat reflektif dan interaktif, yang tidak hanya memberi ruang bagi siswa untuk mengutarakan pandangannya, tetapi juga mendengarkan dan menghargai perbedaan sudut pandang. Dalam dunia yang serba terhubung, keberhasilan pendidikan Pancasila tidak hanya diukur dari seberapa baik seseorang memahami nilai-nilainya, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menerapkannya dalam interaksi sosial yang majemuk, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dengan demikian, pendidikan Pancasila di era digital dituntut untuk membentuk warga negara yang tidak hanya toleran secara pasif, tetapi aktif merawat dan memperjuangkan harmoni dalam kebinekaan.

#### 5. Arus Globalisasi

Globalisasi telah membawa dunia ke dalam suatu tatanan baru yang sangat terbuka dan saling terhubung. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan interaksi lintas negara terjadi dalam hitungan detik. Budaya, nilai, dan gaya hidup dari berbagai belahan dunia kini dapat diakses dan diadopsi dengan mudah, terutama oleh generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital. Meskipun globalisasi memberikan berbagai manfaat positif seperti kemajuan ilmu pengetahuan, pertukaran budaya, dan peluang ekonomi, ia juga menghadirkan tantangan serius bagi pendidikan Pancasila. Nilai-nilai luar yang masuk secara masif, bila tidak disaring dengan bijak, dapat mengikis identitas kebangsaan dan melemahkan penghayatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila.

Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila menghadapi tugas berat untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia dan keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai nasional. Pengaruh budaya asing yang individualistik, materialistik, atau bahkan bertentangan dengan nilai kolektivitas, gotong royong, dan kebhinekaan yang dijunjung Pancasila dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Hal ini dapat menimbulkan dilema identitas dan krisis nilai, di mana individu merasa lebih dekat dengan budaya global daripada akar budayanya sendiri. Tantangan ini semakin diperkuat oleh algoritma media sosial yang memperkuat eksposur terhadap nilai-nilai dominan global dan mengabaikan konten-konten lokal yang mencerminkan karakter bangsa.

Untuk menghadapi arus globalisasi ini, pendidikan Pancasila tidak boleh bersifat reaktif atau defensif semata, melainkan harus adaptif dan progresif. Artinya, pendidikan harus mampu mengajarkan peserta didik untuk bersikap terbuka terhadap perubahan dunia, namun tetap memiliki filter ideologis yang kuat berbasis nilai-nilai Pancasila. Pendidikan tidak boleh melarang keterlibatan dalam dunia global, tetapi harus membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, etika kebangsaan, dan semangat nasionalisme yang tidak sempit. Pemanfaatan teknologi digital dapat diarahkan untuk memperkuat narasi kebangsaan dan mengangkat kearifan lokal ke panggung global, sehingga generasi muda tidak hanya menjadi konsumen budaya asing, tetapi juga produsen nilai-nilai luhur Indonesia yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam masyarakat global.

Dengan demikian, tantangan globalisasi bukan untuk ditolak, tetapi untuk dihadapi secara cerdas dan strategis. Pendidikan Pancasila harus menjadi benteng sekaligus jembatan mampu melindungi nilai-nilai kebangsaan dari pengaruh negatif global, sambil tetap membuka jalan bagi generasi muda untuk menjadi warga dunia yang berkarakter Pancasila.

#### 6. Masuknya Budaya Asing ke Indonesia

Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang pesat di era digital telah membuka gerbang selebar-lebarnya bagi masuknya budaya asing ke Indonesia. Media sosial, film, musik, fashion, kuliner, hingga gaya hidup dari berbagai belahan dunia kini dapat diakses secara instan dan dikonsumsi oleh masyarakat, terutama generasi muda, tanpa batas ruang dan waktu. Fenomena ini tak sepenuhnya negatif, karena interaksi antarbudaya sebenarnya bisa memperkaya wawasan dan membuka cakrawala berpikir yang lebih luas. Namun, masuknya budaya asing juga menghadirkan tantangan yang serius bagi pendidikan Pancasila, karena tidak semua nilai yang dibawa oleh budaya global selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Budaya asing yang mengedepankan individualisme, konsumerisme, dan gaya hidup instan, misalnya, bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip seperti gotong royong, kesederhanaan, dan kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam situasi ini, pendidikan Pancasila memiliki peran strategis sebagai filter nilai, yang membantu masyarakat khususnya pelajar dan generasi digital—untuk

mampu menyaring mana unsur budaya asing yang bisa diterima dan memperkaya kehidupan bangsa, dan mana yang harus ditolak karena bertentangan dengan jati diri Indonesia. Pancasila tidak mengajarkan sikap tertutup terhadap perubahan atau pengaruh luar, tetapi justru mengajarkan sikap selektif, terbuka, dan bijaksana. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila harus mengajarkan cara berpikir kritis dan kontekstual, agar peserta didik tidak menelan begitu saja tren dan gaya hidup yang sedang populer secara global, melainkan mampu mengkaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai budaya lokal dan etika kebangsaan.

Lebih dari itu, penting juga bagi pendidikan Pancasila untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sebagai identitas dan kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan di tengah derasnya arus budaya asing. Ini bisa dilakukan melalui pengenalan tradisi, bahasa daerah, kesenian lokal, dan kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Teknologi digital pun dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelestarian budaya melalui konten kreatif, media sosial, dan platform digital lainnya, sehingga budaya lokal tidak hanya bertahan, tetapi juga tampil menarik dan relevan di tengah dunia global. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai kompas moral dan budaya yang menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap budaya asing dan keteguhan dalam menjaga identitas nasional. Dengan demikian, pendidikan Pancasila harus mampu membimbing generasi muda menjadi pribadi yang terbuka terhadap dunia, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai bangsanya sendiri.

#### 7. Penggunaan Teknologi yang Bebas

Era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kebebasan dalam mengakses dan menggunakan teknologi. Internet, media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital lainnya kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, kebebasan ini juga membuka peluang bagi penyalahgunaan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Di ruang digital, siapa saja bisa dengan mudah menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, konten provokatif, hingga melakukan tindakan berbahaya seperti peretasan terhadap akun pribadi maupun institusi pemerintahan. Kebebasan yang tidak diiringi dengan tanggung jawab dan kesadaran etis inilah yang menjadi salah satu tantangan besar bagi pendidikan Pancasila di era digitalisasi.

Dalam konteks ini, Pancasila sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku di dunia digital. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam Pancasila harus ditanamkan sebagai fondasi etika digital. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting untuk mengajarkan kepada peserta didik bahwa penggunaan teknologi bukan sekadar soal kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral. Perilaku di dunia maya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai kehidupan nyata, karena dampaknya bisa sangat besar terhadap individu lain maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu diintegrasikan dengan program literasi digital secara menyeluruh, agar generasi muda tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran etis dalam penggunaannya.

Lebih jauh, teknologi digital juga dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung penyebaran nilai-nilai Pancasila. Melalui media sosial, blog, video kreatif, dan platform daring lainnya, masyarakat dapat membangun komunitas digital yang produktif, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan Pancasila harus mendorong siswa dan pemuda untuk terlibat dalam penciptaan konten positif yang mendorong toleransi, persatuan, kerja sama, dan semangat gotong royong. Hal ini akan menciptakan ekosistem digital yang sehat dan sejalan dengan cita-cita bangsa. Dengan demikian, tantangan kebebasan teknologi dapat diubah menjadi peluang, asalkan pendidikan Pancasila mampu menjadi alat pembimbing moral dan

etika di tengah derasnya arus digitalisasi yang serba bebas dan tanpa batas.

#### 8. Penyebaran Berita Bohong

Salah satu tantangan besar dalam pendidikan Pancasila di era digitalisasi adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks yang begitu mudah menjangkau masyarakat melalui media sosial dan platform digital lainnya. Kemajuan teknologi informasi memang membawa kemudahan dalam mengakses berita dan pengetahuan secara instan, namun di saat yang sama juga menimbulkan risiko serius ketika informasi yang beredar tidak akurat, menyesatkan, atau bahkan sengaja dipalsukan untuk kepentingan tertentu. Hoaks dapat menyulut kebingungan, memperkeruh situasi sosial-politik, menimbulkan ketegangan antar kelompok, hingga memicu konflik horizontal. Fenomena ini jelas bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, karena hoaks sering kali bersifat provokatif dan memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan.

Penyebaran hoaks bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut rendahnya kesadaran kritis dan literasi informasi di kalangan masyarakat. Banyak orang menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenarannya, sekadar karena emosi, keinginan untuk viral, atau karena terbawa arus opini publik. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila berperan sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas, kebenaran, dan tanggung jawab sosial dalam bermedia. Peserta didik perlu diajarkan untuk tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga menginternalisasikannya dalam perilaku digital sehari-hari, seperti berhati-hati dalam membagikan informasi, mengklarifikasi sumber berita, dan berpikir kritis terhadap setiap narasi yang diterima.

Untuk menghadapi tantangan ini secara efektif, pendidikan Pancasila perlu dikolaborasikan dengan literasi media dan informasi sebagai bagian integral dari kurikulum. Guru dan pendidik dapat mengajak siswa untuk mempelajari cara mengenali berita palsu, menganalisis motif di balik penyebaran hoaks, dan memahami dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, kampanye digital yang mengedepankan persatuan, toleransi, dan klarifikasi informasi perlu digencarkan dengan pendekatan yang kreatif dan sesuai dengan budaya digital generasi muda. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi yang dipelajari di atas kertas, tetapi juga menjadi nilai hidup yang membimbing masyarakat dalam berinteraksi secara sehat dan bertanggung jawab di dunia maya. Upaya ini sangat penting agar ruang digital Indonesia tidak menjadi arena perpecahan, tetapi justru menjadi media penguatan identitas nasional dan persatuan bangsa.

#### 9. Kurangnya Kesadaran Menjaga Nilai Pancasila

Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang begitu cepat, tantangan lain yang tidak kalah penting dalam pendidikan Pancasila adalah kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila. Lima nilai utama Pancasila—Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan—merupakan fondasi moral dan ideologis bangsa Indonesia. Namun, sering kali nilai-nilai ini hanya dipahami secara tekstual atau simbolik, tanpa dihayati sebagai panduan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam perilaku sehari-hari di ruang digital. Akibatnya, muncul berbagai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan semangat Pancasila, seperti intoleransi, ujaran kebencian, ketidakadilan sosial, dan apatisme terhadap masalah kebangsaan.

Rendahnya kesadaran ini mencerminkan bahwa pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya tertanam kuat dalam jiwa masyarakat. Banyak yang belum menyadari bahwa menjaga nilai-nilai Pancasila bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab kolektif setiap warga negara. Kurangnya penanaman nilai ini dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan identitas nasional, terutama ketika generasi

muda lebih terpapar oleh pengaruh luar dan nilai-nilai yang tidak selalu sejalan dengan ideologi bangsa. Jika tidak diantisipasi, hal ini bisa mengarah pada degradasi moral, luntarnya semangat persatuan, dan melemahnya karakter kebangsaan dalam masyarakat.

Sebagai solusi, pendidikan Pancasila harus menjadi pilar utama dalam membangun kembali kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai dasar bangsa. Kurikulum pendidikan perlu memperkuat pendekatan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan aplikatif. Artinya, peserta didik tidak hanya diajarkan tentang isi Pancasila, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata—baik dalam pergaulan sosial, dunia digital, maupun dalam pengambilan keputusan sebagai warga negara. Nilai-nilai tersebut harus dikontekstualisasikan dengan tantangan zaman, sehingga peserta didik bisa memahami relevansi Pancasila dalam menghadapi isu-isu seperti keadilan sosial, demokrasi digital, keberagaman, dan tanggung jawab ekologis.

Selain di sekolah, penguatan kesadaran ini juga harus melibatkan keluarga, masyarakat, media, dan institusi negara. Pancasila harus dihidupkan sebagai nilai bersama yang mengikat seluruh elemen bangsa, bukan hanya sebagai dokumen formal negara. Ketika kesadaran terhadap Pancasila tumbuh kuat di tengah masyarakat, kita akan memiliki generasi yang tidak hanya cerdas dan melek digital, tetapi juga bertanggung jawab, beretika, dan memiliki komitmen terhadap persatuan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

Dengan perkembangan teknologi, kemampuan dan akses digital menjadi sangat penting dalam pendidikan. Namun, menghadapi era digital ini tidaklah mudah, terutama bagi siswa dan guru yang tidak memiliki akses atau keterampilan digital yang cukup. Oleh karena itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh siswa dan guru terkait akses dan keterampilan digital, antara lain:

a) Keterbatasan akses internet

Keterbatasan akses internet berarti bahwa seseorang atau kelompok tidak bisa dengan mudah terhubung ke internet. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti infrastruktur yang kurang baik. Di beberapa daerah, terutama di pedesaan atau tempat terpencil, mungkin tidak ada jaringan internet yang memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Selain itu, biaya untuk langganan internet yang tinggi juga bisa menjadi penghalang bagi banyak orang untuk mendapatkan akses. Kurangnya perangkat yang diperlukan, seperti komputer atau smartphone, juga menjadi masalah, karena tanpa perangkat tersebut, orang tidak bisa mengakses internet. Selain itu, jika seseorang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk menggunakan internet, itu juga bisa menghambat akses, meskipun secara fisik mereka bisa terhubung. Keterbatasan ini dapat mengganggu proses belajar dan mengakses informasi yang penting, terutama di zaman digital seperti sekarang.

b) Kurangnya perangkat digital

Kurangnya perangkat digital, seperti komputer atau smartphone, menghalangi orang untuk mengakses internet. Tanpa perangkat yang tepat, mereka tidak bisa terhubung ke dunia digital, yang berdampak buruk pada pendidikan, pekerjaan, dan akses informasi penting, terutama di daerah terpencil. Masalah ini sering disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi yang sulit, di mana banyak orang, terutama di daerah berpenghasilan rendah, tidak mampu membeli perangkat yang diperlukan. Selain itu, infrastruktur yang kurang baik di beberapa daerah, terutama di pedesaan, membuat masyarakat kesulitan mendapatkan akses ke teknologi. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan untuk menggunakan perangkat digital juga menjadi masalah, karena tanpa pelatihan yang cukup, mereka tidak bisa memanfaatkan perangkat yang ada. Ini

berdampak pada pendidikan, di mana siswa yang tidak memiliki perangkat digital akan kesulitan mengikuti pembelajaran online dan mengakses materi belajar. Selain itu, tanpa perangkat digital, orang tidak bisa mengakses informasi penting yang tersedia di internet, yang dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dan karier mereka. Secara keseluruhan, kurangnya perangkat digital menciptakan kesenjangan besar dalam akses terhadap pendidikan dan informasi, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

c) Keterbatasan keterampilan digital

Keterbatasan keterampilan digital berarti kurangnya kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi dan alat digital dengan baik, yang dapat menghalangi mereka untuk mengakses informasi, pendidikan, dan peluang kerja. Masalah ini sering terjadi karena kurangnya pelatihan, akses yang terbatas ke perangkat digital, dan ketidakpahaman tentang cara menggunakan teknologi yang ada. Akibatnya, orang yang tidak memiliki keterampilan digital yang cukup bisa tertinggal di era informasi ini, yang dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

d) Tidak adanya dukungan teknis yang memadai

Tidak adanya dukungan teknis yang memadai berarti kurangnya bantuan atau sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan teknologi dan perangkat digital. Ini bisa termasuk kurangnya layanan pelanggan, pelatihan, atau bimbingan yang dibutuhkan untuk membantu orang atau organisasi menggunakan teknologi dengan baik. Tanpa dukungan teknis yang cukup, pengguna mungkin kesulitan saat menghadapi masalah, seperti kesalahan pada perangkat lunak atau perangkat keras yang tidak berfungsi, yang dapat mengganggu produktivitas dan akses mereka terhadap informasi. Selain itu, kurangnya dukungan ini bisa membuat orang merasa frustrasi dan kurang percaya diri dalam menggunakan teknologi, sehingga mereka cenderung menghindari alat digital yang sebenarnya bisa sangat bermanfaat. Secara keseluruhan, tidak adanya dukungan teknis yang memadai dapat menghambat kemajuan dan inovasi, serta memperburuk kesenjangan digital di masyarakat.

e) Kurangnya sumber daya digital yang berkualitas

Kurangnya sumber daya digital yang berkualitas berarti minimnya akses terhadap konten, alat, dan materi digital yang dapat membantu dalam belajar, mengembangkan keterampilan, dan mendapatkan informasi yang berguna. Sumber daya digital yang berkualitas mencakup berbagai hal, seperti kursus online, artikel, video edukatif, dan aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengguna. Ketika sumber daya ini tidak tersedia atau tidak berkualitas, orang dan komunitas akan kesulitan mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat, yang dapat menghambat proses belajar dan pengembangan diri. Selain itu, kurangnya sumber daya digital yang baik dapat memperburuk kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan informasi yang baik dengan mereka yang tidak, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan dan pengembangan karier.

Pendidikan Pancasila sangat penting untuk menghentikan polarisasi sosial yang semakin muncul di masyarakat. Penyalahgunaan media digital, seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan konflik kepentingan yang didasarkan pada perbedaan ideologi atau agama, sering kali memperkuat polarisasi. Dengan memupuk, pendidikan Pancasila dapat menjadi alat strategis untuk membangun masyarakat yang harmonis dengan memupuk nilai-nilai kebangsaan yang universal. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang inklusif, nilai-nilai dasar Pancasila, seperti toleransi, keadilan sosial, dan

gotong royong, sangatlah penting. Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam diri seseorang sehingga mereka menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab sosial. Dalam situasi ini, pendidikan Pancasila berfungsi sebagai proses pembentukan karakter yang berkelanjutan, bukan hanya sebagai pelajaran (Wulandari, 2025).

Media sosial digunakan sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang menarik dan relevan bagi Generasi Z. Misalnya, kampanye digital yang ekspresi percakapan konstruktif, empati, dan toleransi dapat menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan berbasis proyek, seperti kegiatan sosial atau diskusi kelompok, dapat membantu siswa memahami dan merasakan lebih banyak tentang Pancasila. Pendidikan Pancasila juga mendorong kesadaran siswa terhadap masalah sosial yang dihadapi bangsa. Mereka diajari untuk mempertimbangkan masalah-masalah sosial seperti konflik horizontal atau polarisasi politik dan menemukan solusi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang ideologi bangsa mereka, tetapi juga mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan berempati dengan orang lain (Wulandari, 2025).

## KESIMPULAN | CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, tantangan pendidikan Pancasila di era digitalisasi adalah meluasnya disinformasi, dangkalnya pemahaman terhadap Pancasila, terganggunya partisipasi, keragaman yang perlu dikelola, arus globalisasi, masuknya budaya asing ke Indonesia, penggunaan teknologi yang bebas, penyebaran berita bohong, dan kurangnya kesadaran menjaga nilai Pancasila.

## REFERENSI | REFERENCE

- Afsi, N., Nurfadillah, F., Nafisah, H., Lazuardy, M., & Antoni, H. (2025). Implementasi Pancasila di Era Digital: Tantangan dan Peluang Generasi Z. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*. Vol 3(1).
- Andani, M. (2024). Implementasi Pendidikan Pancasila dalam Pendidikan Toleransi di Era Digital. *Jurnal Ilmiah dan Karya Inovasi Guru*. Vol 1(1).
- Arya, M., & Maulia, S.T. (2024). Tantangan dan Peluang Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol 3(11).
- Churniawan, E., Amin, F., Zaelanu, M.A., Rusydi, M.T., Nababan, K.R., Rustan., Santoso, M., Hendriawan, F., Watunglawar, B., Jati, D.H.P., Pahrudin, P., & Susmayanti, R. (2024). *Pancasila dalam Pendidikan Tinggi*. Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka.
- Gustifal, R., Septina, W.W., Adrias, A., & Alwi, N.A. (2024). Tantangan dan Strategi Implementasi Mata Pelajaran PPKn di Era Digital. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*. Vol 3(3).
- Kartini, A., & Dewi, D.A. (2021). Implementasi Pendidikan Pancasila Dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Generasi Muda di Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*. Vol 9(1).
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Mustari, M. (2023). Peran Guru PPKn dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di SMA Muhammadiyah Sumbawa. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. Vol 8(2).
- Madania Priyanka, M., Nathatrya, A., Bella, A.S., Aproditya, A.A., Wafa, M.A., & Ghozali, I. (2024). Challenges and Opportunities of Citizenship Education in the Digital Age: Tantangan dan Peluang Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital.

*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 1(3).*

Marzuki., Hasanah, N., & Cahyani, A. (2025). Pancasila Dan Tantangan Di Era Digital.

*Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol 3(1).*

Ramadhani, A.B., Halizah, N.F., Untari, H., Anggraini, M.S., Kristina, M.A., & Puspita,

A.M.I. (2024). Transformasi Pancasila Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan.

*Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan. Vol 2(3).*

Wulandari, A.T., Panggabean, S.A., Mubarak, F., & Antoni, H. (2025). Efektivitas Pendidikan Pancasila Bagi Generasi Z dalam Mencegah Disintegrasi Sosial di Era Digitalisasi. *Journal of Student Research. Vol 3(1).*